

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Armando Soares, Ratih Nurpratiwi dan M. Makmur

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Jl. MT. Haryono 163 Malang

Email : soaresarmando705@yahoo.co.id

Abstrak: Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. proses perencanaan pembangunan daerah di Distrik Manatuto rencana dimulai dari komunitas masyarakat, kampung, dewan desa, kecamatan dan stakeholders di daerah. Ditinjau kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengesahkan dokumen rencana daerahnya masyarakat kurang puas, karena pengesahan dokumen rencana pembangunan daerah oleh pemerintah pusat tidak berdasarkan pada dokumen rencana yang diajukan kepada pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini untuk: a) mendeskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator dalam perencanaan pembangunan di distrik manatuto. b) mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di distrik Manatuto. Dan metode yang digunakan yaitu; deskriptif kualitatif, yang menggambarkan keadaan sesungguhnya dilapangan. Hasil temuan di lapangan bahwa, pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator akan melibatkan sektor-sektor masing-masing kementerian yang ada di distrik untuk berpartisipasi dalam tim Komisi Pembangunan Daerah untuk melakukan verifikasi, mengevaluasi dan supervisi terhadap program prioritas perencanaan pembangunan daerah.

Kata Kunci : Peranan Pemerintah Daerah Sebagai Entrepreneur, Koordinator, Fasilitator dan Stimulator.

***Abstract:** The role of local governments in development planning is to have the authority and ability to manage, implement regional development programs. because the role of local governments to determine the success of the implementation process of governance and development activities in the area. Regional development planning process in Manatuto plan starts from the community, village, village councils, districts and stakeholders in the area. Judging from the policy of the central government to ratify the regional plan document public less satisfied, because the ratification documents of local development plans by the central government is not based on documents submitted plans to the central government. The purpose of this study was to: a) describe and analyze the role of local government as an Entrepreneur, coordinator, facilitator and stimulator in development planning in Manatuto. b) describe and analyze the factors supporting and inhibiting role of local authorities in regional development in Manatuto district. And the methodology used is; descriptive qualitative, which portray the real situation in the field. The findings in the field that, the local government as Entrepreneur, coordinator, facilitator and stimulator will involve sectors each ministry in the district to participate in the Regional Development Commission team to perform verification, evaluation and supervision of the priority programs of regional development planning.*

***Keywords:** Role of Local Government As Entrepreneur, coordinator, facilitator and stimulator.*

PENDAHULUAN

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah

adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber-daya-sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Riyadi & Bratakusamah (2004: 8). Dalam pengertian ini pemerintah daerah sebagai peran perencana untuk mendesain dan membentuk intreaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Dengan ini pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah dan menyesuaikan dengan fungsi visi, misi, sasaran dan tujuan yang terapkan. Sedangkan berkaitan dengan pengertian ini maka, Soemendar (1985:1) dalam (Sayafiie 2011:8) bahwa, pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komonikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi. sebagian dari fungsi utama pemerintahan daerah yang terutama adalah memperbaiki dan menyelesaikan tuntutan/aspirasi masyarakat.

Ndraha (1987 : 110) menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seorang pemimping, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah. Rasyid (2000 : 48) menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan / dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu : pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).” dalam hubungan tersebut menegaskan bahwa, pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu: Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) suatu penelitian ini digunakan untuk menguraikan atau mendeskripsikan dan menganalisis masalah-masalah yang terjadi dilapangan atau tempat penelitian, dimana peristiwa, aktifitas social, sikap, kepercayaan, pengamatan, telah terjadi maupun belum terjadi di lokasi penelitian tersebut.

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), bahwa dalam metode ini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yaitu: (a). Wawancara, (b). Observasi dan (c). Dokumentasi dari ketiga data ini membantu peneliti untuk mengumpulkan semua data dilapangan dan peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari bebrbagai metode, dalam memakai teknik pengumpulan data analisis triangulasi yang dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. analisis data peneliti menggunakan Model Analisis Model Spradley yaitu: 1). Analisis domain 2). Analisis taksonomi, 3). Analisis Komponensial dan 4). Analisis tema/Budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan pemerintah daerah sebagai entrepreneur yaitu, pemerintah daerah dapat mendorong tumbuhnya entrepreneur melalui kebijakan kecil atau industri kecil. Kebijakan bagi usaha kecil yaitu melalui pemberian bantuan dan pelatihan kepada usaha perorangan untuk meningkatkan usahanya. Jika ada pengusaha yang kekurangan modal maka pemerintah bisa membantu dengan memberi kredit dan subsidi kepada pengusaha di daerah. Diharapkan dengan subsidi dan kredit tersebut pengusaha kecil akan mempunyai tingkat yang cukup besar untuk pengembangan usaha lebih lanjut. Pemerintah daerah sebagai entrepreneur memiliki peran penting dalam kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah maupun negara. Bahwa dengan adanya entrepreneur di daerah akan menciptakan inovasi proses produksi secara berani mengambil resiko dalam melakukan usaha. Dengan kemampuan melakukan inovasi-inovasi dan keberanian menerapkan inovasi dalam perusahaan, entrepreneur mampu mendirikan perusahaan. Usaha baru yang dibangun akan membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi jumlah entrepreneur maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, setidaknya dibutuhkan entrepreneur semaksimal mungkin.

Peranan pemerintah daerah sebagai koordinator, bilamana ditinjau dari tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah sehingga kepala Administrasi Kabupaten adalah layanan desentralisasi pemerintah daerah untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan, koordinasi dan dukungan semua kegiatan layanan pemerintah di tingkat kabupaten. Khususnya pelaksanaan, implementasi dan monitoring kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan ini pemerintah daerah menggunakan wewenang dan kompetensi untuk berperan sebagai koordinator untuk mengkoordinir semua kegiatan dan pekerjaan yang ada di daerah dan bagaimana menciptakan perubahan proses pembangunan di Distrik Manatuto. Karena kepala pemerintahan daerah/ Bupati di Distrik Manatuto mempunyai komitmen sebagai pemimpin yang bermakna untuk berkoordinasi dan berorientasi kepada sektor-sektor/ lembaga pemerintahan, NGO Nasional, NGO Internasional dan *Civil Society* yang ada di Distrik Manatuto. Dan bagaimana melakukan perubahan-perubahan di masing-masing sektor untuk membangun dan mengembangkan segala kegiatan yang diperlukan sebagai faktor-faktor terpenting dalam pembangunan di daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi langsung dengan perangkat daerah dan masyarakat untuk memahami situasi dan kondisi riil daerah untuk menganalisis keadaan daerah. Dan bagaimana merencanakan untuk membangun daerah ini kedepan hal ini pemerintah daerah melakukan survei dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi dari masyarakat sendiri. Atau melalui pemotretan/profil daerah, fisik wilayah geografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial budaya, lingkungan hidup, potensi wilayah, dan pemerintah daerah juga harus memperhatikan kepada peluang dan tantangannya daerah tersebut.

Peranan pemerintah sebagai fasilitator, Riyadi dan Bratakusuma (2003:6) perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tapi tetap berpegang pada azas prioritas. Peranan pemerintah daerah untuk memfasilitasi program perencanaan pembangunan daerah terpadu perlu melibatkan partisipasi masyarakat populer di sebut *Bottom up Planning* (perencanaan dari bawah) keterlibatan masyarakat langsung berkaitan dengan slogan negara demokratis yaitu perencanaan sampai pada masyarakat yang paling bawah. Pembahasan ini peneliti simpulkan dari beberapa teori dan hasil penelitian lapangan tentang peranan pemerintah daerah sebagai fasilitator yaitu, pelaksanaan program pemerinthan harus sesuai dengan sarana dan prasaran

dan sesuai dengan pedoman perencanaan investasi daerah, PID (Plano Investemento Distrital) sebab program pada pedoman tersebut telah disusun oleh pemerintah daerah dan komonitas masyarakat.

Peranan pemerintah daerah sebagai stimulator untuk pemerintah dapat berperan sebagai stimulan dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat memengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut. Pemerintah daerah di distrik Manatuto sedang berperan aktif sebagai stimulator yang mendorong masyarakatnya untuk terus berkarya untuk mencapai kemakmuran dan kejayaan. Banyak cara yang dilakukan mulai dari memberikan bantuan dana hingga mempromosikan produk masyarakat melalui pameran dan beberapa media masa dan elektronik tentang sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki di distrik Manatuto ke dunia luar. Upaya membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan pemikiran pemerintah, termasuk kepedulian dunia usaha kepada pengusaha kecil. Maka pemerintah daerah tetap konsisten dengan arah kebijakan pembangunan yang berorientasi kepada pengembangan ekonomi kerakyatan. Dalam pengertian ini peneliti mengkaitkan dengan teori dan hasil penelitian lapangan bahwa pemerintah mesti lebih banyak memotivasi kepada pengusaha lokal untuk meningkatkan usahanya, dan pemerintah juga menarik investasi dari luar daerah atau internasional ke daerah dalam rangka untuk mengelolah usaha dan bisnis, karena perkembangan perekonomian daerah melalui sektor swasta yang paling banyak memberikan keuntungan dan pendapatan bagi daerah secara langsung maupun tidak langsung.

Faktor Pendukung Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Distrik Manatuto.

Faktor pendukung peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di Distrik Manatuto adalah suatu kesempatan yang baik dari pemerintah pusat yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan di daerah. Dilihat dari perencanaan dilaksanakn di distrik Manatuto Timor Leste yaitu: perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara fisik maupun non fisik berdasarkan pada tipe-tipe perencanaan yang disebut *Bottom-Up Planning*. Dilihat dari segi pendukungnya pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan proses perencanaan sendiri di wilayah-wilayah yang telah teridentifikasi sebagai program prioritas masyarakat di daerah rural atau daerah tertinggal untuk di bangun. Sejalan dengan ini peraturan pemerintah RDTL No. 4/2012, tentang program pemerintah Perencanaan Pembangunan Daerah Terpadu atau PDID (Planeamento Dezenvolvimento Integrado Distrital). Dan peraturan pemerintah No. 21/ 2013, 13 Nopember, tentang penyusunan Perencanaan Investasi Daerah atau PID (Plano Invetemento Distrital) itu adalah suatu tujuan utama dalam perencanaan pembangunan di daerah. Kedua peraturan ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai peran utama untuk melakukan implementasi bersama masyarakat di daerah. Dalam hal ini pemerintah pusat memberikan peluang dan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah bersama komonitas masyarakat untuk menyusun dan merumuskan program prioritas pembangunan di daerahnya sendiri. Nurcholis dkk (2008: 11) perencanaan pembangunan partisipatif itu sebagai model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat dan masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah. Dengan ini maka partisipasi masyarakat adalah suatu alternatif untuk memberikan informasi dan identifikasi program prioritas sendiri untuk melakukan pembangunan, hal ini masyarakat sebagai petunjuk dasar program prioritas daerah.

Faktor Penghambat Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Distrik Manatuto

Faktor penghambat peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di Distrik Manatuto yaitu: perencanaan pembangunan dari komonitas masyarakat sesuai dengan program-program yang diprioritaskan di daerah. tetapi yang menjadi hambatan adalah kebijakan dan keuangan dari pemerintah pusat seperti halnya dikatakan, bahwa semua proposal proyek yang diajukan kepada pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri mereka yang melakukan kebijakan kepada proposal proyek tersebut dan mereka harus menyesuaikan proposal proyek itu dengan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahunan. Dari situlah kita mengetahui bahwa proses pendistribusian anggran pendapatan belanja negara akan berpengaruh pada perencanaan pembangunan daerah yang telah direncanakan bersama oleh komonitas masyarakat dengan pemimpin-pemimpin di daerah. Permasalahan tersebut akan menyebabkan penghambat proses pembangunan di daerah dan komonitas masyarakat tidak memuaskan kepada kebijakan pemerintah pusat karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi riil di daerah.

KESIMPULAN

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di Distrik Manatuto yang ada pada umumnya proses perencanaan dilakukan oleh komonitas masyarakat serta pemimpin lokalnya, dengan penentuan strategi pembangunan daerahnya dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi dan potensi lingkungan yang dimiliki di daerah. Baik yang sudah dapat dilaksanakan maupun belum. Peranan pemerintah daerah dan komonitas masyarakat di daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah itu berjalan dengan baik apabila dilihat dari segi penyusunan dokumen rencananya. Karena dokumen rencana akan menyangkut smeua bidang-bidang atau aspek-aspek perencanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Pemerintah daerah berperan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan pemerintah daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan pembangunan secara fisik maupun non fisik oleh pemerintah daerah sendiri tetapi masih menghadapi kendala dan permasalahan yaitu:

- a. Program perencanaan yang dirumuskan oleh komonitas masyarakat dan pemimpin lokal dalam bentuk dokumen rencana yang diajukan kepada pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri kadang ditolak (*pending*). Karena mereka selalu berpatokan kepada APBN.
- b. Pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri melakukan menyeleksi dokumen rencan yang diajukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk memilih program-program tertentu saja untuk mengesahkan ini adalah menjadi salah satu masalah bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
- c. Kementerian dalam negeri pusat mengusulkan proposal untuk anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tidak berdasarkan pada kondisi dan situasi riil yang ada di daerah, sehingga pencairan dana APBN tidak mencukupi pada proposal proyek yang disampaikan oleh pemerintahan daerah.
- d. Faktor pengahambat secara umum dalam perencanaan pembangunan akibatnya kebanyakan kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan aspirasai dan keinginan masyarakat di daerah sehingga pemanfaatan dari hasil pembangunan oleh masyarakat menjadi tidak maksimal. Bahkan banyak pula masyarakat yang kecewa karena apa yang dibangun oleh pemerintah ternyata tidak berkaitan sama sekali dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat

SARAN

1. Peranan pemerintah daerah sebagai entrepreneur perlu menciptakan dan mengelolah perekonomian daerah melalui perusahaan milik daerah, pemerintah daerah juga memberi dorongan kepada pengusaha kecil untuk meningkatkan usahanya dan pemerintah perlun menarik investor asing untuk meninvestasi di daerah.
2. Pemerintah daerah sebagai koordinator sangat penting untuk mengkoordinasi, menjelaskan dan menjamin informasi kepada masyarakat terkait progres/hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. tim komisi pembangunan daerah untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan startegi-startegi bagi pembangunan di daerahnya dan juga pemerintah daerah dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat untuk merumuskan program startegis perencanaan pembangunan secara kondisional dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah rural/pelosok.
3. Pemerintah daerah sebagai fasilitator perlu menciptakan lingkungan kemasyarakatan yang aman dan tenteraman untuk mendorong masyarakat dalam mempercepat pembangunan daerah melalui perbaikan lingkungan dan perilaku di daerahnya. untuk mengefisien proses pembangunan daerah, perbaikan prosedur perencanaan daerah dan penetapan peraturan-peraturan yang telah ada. supaya menyesuaikan program proyek yang direncanakan berdasarkan kebutuhan primer masyarakat.
4. Peranan pemerintah daerah sebagai stimulator, pemerintah perlu menciptakan undang-undang bagi pengusaha dan memberikan motivasi melalui pelatihan kepada pengusaha kecil dan menengah memberikan subsidi kepada pengusaha industri-industri kecil, menyediakan pameran terhadap produk-produk daerah dan pemerintah juga menjaga dan mejamin keamanan kepada perusahaan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Decreto Lei / Keputusan Undang-Undang. (RDTL. No. 4/2012). *Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Terpadu*
- Hanif Nurcholis. (Agustus 2011) “Studi Pemerintahan Hubungan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Serta Peran Wakil Pemerintah” Jurnal Volume 2 Nomor 2.
- Moleong J. Lexi. (1989). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* penerbit: PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Rasyid Ryaas. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Kesatuan*. penerbit Yogyakarta
- Riyadi & Deddy Bratakusumah. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Santosa Pandji. (2008). *Administrasi Publik (Teori Dan Aplikasi Good Governance)*. Penerbitan oleh: PT Refika Aditama, Bandung
- Saragih Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi* penerbit; Ghalia Indonesia Jakarta
- Sayafiie Inu Kencana. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Penerbit Pustaka Rineka Cipta Bandung
- ,(2011). *Etika Pemerintahan*. penerbit oleh: PT Rineka Cipta, Jakarta
- Undang-Undang Dasar RDTL, Tahun 2002. Pasal 72 Tentang Pemerintahan Daerah